



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Juru Bicara : Ir. Atmaji

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.
Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.
Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.
Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan rahmatNya pada kita semua. Sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD DIY dalam keadaan sehat wal afiat.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Salah satu syarat tata kelola keuangan daerah yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, harus mempedomani pada tatakala siklus anggaran yang telah ditetapkan. Perubahan APBD adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang ketentuan dalam Pasal 317 Ayat 4 terpenuhi. Oleh karena itu, momentum perubahan APBD dapat dijadikan kesempatan untuk evaluasi dan penajaman program dan target pembangunan daerah. Jika pemahaman umum yang sering kita dengar bahwa Perubahan APBD dilakukan untuk memanfaatkan SILPA tahun anggaran sebelumnya, namun sesungguhnya Perubahan APBD sekaligus dimanfaatkan untuk evaluasi program dan kegiatan dalam APBD tahun berjalan. Monitoring capaian target melalui evaluasi triwulanan disertai dengan penyusunan prognosis senam bulan kedepan, akan memberikan gambaran riil

posisi dan perjalanan APBD tahun berjalan. Sehingga *focussing* dan orientasi anggaran dapat terus dilakukan sebagaimana perencanaan.

Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 menurut hemat kami, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Perjalanan pelaksanaan APBD DIY Tahun 2021, dimana wabah pandemi masih terjadi, membutuhkan pencermatan yang mendalam agar efisiensi dan efektifitas anggaran dapat tercapai. Delapan belas bulan pandemi berlangsung, tentu sangat mempengaruhi dalam penyusunan program dan target pembangunan. Tahun 2021 menjadi tahun krusial karena pada satu sisi kita dituntut untuk terus menangani pandemi dari sisi Kesehatan/medis, namun pada sisi lain masyarakat semakin kuat menuntut untuk segera dibukanya keran kegiatan ekonomi agar keberlangsungan dan keberlanjutan usaha masyarakat dapat terjamin. Anggaran harus mampu disusun dan diorientasikan untuk memenuhi beberapa kebutuhan, kesehatan, jaminan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Terhadap Penghantaran Raperda Perubahan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur beberapa saat yang lalu, Fraksi PAN menyampaikan apresiasi dimana Pemerintah DIY menunjukkan niat dan kesungguhan untuk mendayagunakan APBD DIY Tahun Anggaran 2021 dengan seoptimal mungkin. Dengan tema pembangunan “Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY”, maka terkandung dua agenda penting dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 berikut perubahannya. Kedua agenda tersebut adalah pertama, penguatan SDM unggul melalui pembangunan dan pengembangan kapasitas masyarakat baik individual maupun secara kelembagaan. Sedangkan agenda kedua adalah percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Fraksi PAN sangat bisa memahami tema tersebut diambil sebagai agenda utama pembangunan tahun 2021. Namun dari narasi yang melatarbelakangi maupun perangkaan dalam rencana anggaran yang diajukan, Fraksi PAN memandang perlu untuk mengajukan permohonan penjelasan dan pertanyaan kepada Gubernur sebagai berikut :

1. Didalam penjelasan Kebijakan Umum Anggaran, khususnya dalam proyeksi kemiskinan DIY sebagaimana tertuang dalam perubahan RKPD Tahun 2021, Pemerintah DIY memproyeksikan kemungkinan angka kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 12,86%. Dijelaskan bahwa hal ini sangat mungkin terjadi jika kondisi pandemi masih terus berlangsung sampai dengan akhir tahun. Angka tersebut jelas terlalu besar jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Kerja Pemerintah sebesar 9,2-9,7%. Pada sisi lain kita ketahui bersama bahwa upaya vaksinasi untuk warga DIY semakin optimal dan terus berjalan, baik vaksinasi oleh Pemerintah maupun partisipasi dunia swasta, serta kasus penularan maupun kematian semakin berkurang. Kemajuan tersebut seharusnya mampu membangun optimisme kepada kita sekalian bahwa kondisi akan semakin membaik pada

akhir tahun 2021 ini. Oleh karena angka target tersebut telah menjadi kesepakatan Bersama DPRD dan Gubernur terhadap Kebijakan Umum APBD Perubahan, Fraksi PAN meandang perlu untuk terus mendorong dan mengingatkan Pemerintah DIY agar bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan.

2. Fraksi PAN juga mendorong Gubernur dengan seluruh jajaran, untuk terus bekerja keras menurunkan angka ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah. Seiring dengan geliat ekonomi di DIY, Pemerintah Daerah perlu untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten/Kota, jangan sampai menjadikan angka ketimpangan wilayah yang semakin besar. Jika melihat capaian pada tahun 2020, maka ketimpangan wilayah dapat dicapai lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Demikian pula dengan angka ketimpangan pendapatan. Dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan, skenario pesimis mematok Indeks Gini pada angka 0,4335. Tetapi dengan mempertimbangkan tahun 2021 yang sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, maka Fraksi PAN optimis angka ketimpangan pendapatan dapat ditekan lebih rendah lagi. Untuk itu maka perlu kerja keras semua pemangku kepentingan.
3. Mencermati penghantaran Gubernur terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, maka pada sisi Pendapatan Fraksi PAN perlu untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan peningkatan maupun penurunan terhadap komponen pendapatan daerah. Beberapa komponen yang mengalami kenaikan adalah pertama, Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan naik sebesar Rp118.690.000,00. Kedua, Retribusi Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 naik sebesar Rp2.185.572.176,00. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah naik sebesar Rp7.502.958.279,00. Sementara itu, untuk komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar Rp4.504.791.119,00, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menurun sebesar Rp64.639.956.067,00. Kami mohon penjelasan apakah kenaikan target pendapatan asli daerah dari ketiga komponen pertama diatas telah mendasarkan pada hasil kajian sebagaimana potensi riil yang ada di lapangan? Kami juga mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan penurunan komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
4. Jika memperhatikan tematik pembanunan tahun 2021, "Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY" maka Penguatan SDM Unggul pada penjelasan tema pembangunan dikatakan : Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan subyek dari pembangunan yang harus ditingkatkan terus-menerus dengan penguatan SDM unggul Dasar (Pendidikan dan Kesehatan), SDM Unggul Kebudayaan, dan SDM Unggul Ekonomi.

Sementara kalo kita lihat pada prioritas belanja, Urusan Pendidikan mengalami penurunan belanja sebesar Rp16.591.254.583,00. Selain menanyakan penurunan belanja pada Urusan Pendidikan tersebut, Fraksi PAN juga mempertanyakan kenaikan belanja pada Urusan Kesehatan sebesar Rp138.329.628.901,00. Dengan penambahan terbesar pada Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Rp68,924,537,200. Bagaimanakah Pemerintah Daerah dapat menjamin ketercapaian target Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular? Mohon penjelasan.

5. Prioritas Belanja pada Urusan Kebudayaan mengalami penyesuaian yang sangat besar dengan total penurunan anggaran Rp92.615.655.439,00, dengan penurunan terbesar pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp42.408.103.200,00. Di satu sisi Fraksi PAN menyambut baik peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UKM, namun pada sisi lain kami perlu mempertanyakan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dengan program Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang mengalami penurunan sangat besar. Jika kami cermati, program tersebut berkaitan dengan pemanfaatan kawasan eks bioskop Indra yang orientasinya untuk menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi dari sektor Usaha Kecil dan Menengah. Mohon penjelasan Eksekutif terkait dengan kebijakan tersebut jika dikaitkan dengan sasaran kedua tema pembangunan tahun 2021 yaitu "Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat DIY". Mengingat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil, mengamanatkan kepada Pemerintah DIY melalui instansi terkait, untuk memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.
6. Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan output kegiatan Bantuan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Covid-19 di Shelter dengan sasaran 78 Kecamatan Se-DIY. Program ini merupakan program yang dimunculkan pada Perubahan APBD 2021 dengan dukungan anggaran sebesar Rp7,495,356,000. Secara umum Fraksi PAN sangat mendukung program ini, namun kami perlu untuk memberikan masukan bahwa tidak seluruh warga yang terpapar Covid-19 melakukan isolasi di shelter. Sebagian besar yang lain melakukan isolasi mandiri di rumah dirumah masing-masing yang juga membutuhkan dukungan bantuan sosial dan bantuan bimbingan psikososial. Fraksi PAN mengharapkan layanan sosial ini dapat dilaksanakan dengan berbagai kreatifitas, sehingga mampu dirasakan secara adil oleh masyarakat yang tidak berada di shelter.
7. Berkaitan dengan pengelolaan sampah terpadu di DIY, program Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp16,953,935,847. Meskipun mengalami penurunan anggaran dibandingkan dengan sebelum perubahan, namun dari sisi

peruntukannya kami melihat masih cukup komprehensif untuk berbagai sektor. Melalui Pemandangan Umum Fraksi ini, kami perlu mengingatkan kembali kepada Pemerintah DIY untuk lebih bersungguh-sungguh dalam kebijakan pengelolaan sampah. Pemerintah DIY harus terus mempedomani Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati,

Demikian pandangan Umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Besar harapan kami bahwa Raperda ini nantinya akan dapat memberi manfaat serta memberi dampak positif bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya dan bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Wassalamu alaikum wr. Wb.

YOGYAKARTA, 6 SEPTEMBER 2021
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. ATMAJI
Ketua

drg. Hj. HANUM SALSABIELA, MBA
Sekretaris



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
RAPBD DIY TAHUN ANGGARAN 2022**

Juru Bicara : Ir. Atmaji

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.
Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.
Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif.
Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sidang Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 3 diatur bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada posisi yang demikian itu, maka keberadaan APBD merupakan instrument yang sangat penting bagi daerah dan bahkan negara. APBD bukan saja sebatas memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, namun Pasal 17 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 mengatur "Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara". Ketentuan ini menegaskan bahwa pembangunan daerah, menjadi pilar bagi pembangunan negara. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara substantif lebih banyak mengatur tentang kewenangan daerah, kesesuaian APBD dengan perencanaan jangka panjang dan menengah, tatakala penyusunan dan pembahasan, serta sanksi manakala terjadi pelanggaran terhadap penetapan APBD. Meskipun untuk tatakala pembahasan ini sekaligus juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, namun pedoman teknis penyusunan dan penetapan APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana Amanah Pasal 308 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Memadukan dari dua ketentuan diatas, maka menjadi penting bagi kita untuk menyusun Rancangan APBD DIY seideal mungkin. Pada satu sisi, kesesuaian dengan dokumen perencanaan pembangunan ditujukan untuk menopang percepatan pembanguna daerah dan ketercapaian tujuan pembangunan nasional, pada sisi yang lain ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD, akan memberikan ruang waktu pelaksanaan yang

lebih optimal. Fraksi PAN berharap bahwa Penghantaran Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2022 bukan saja memenuhi aspek tatakalat pembahasan, namun sekaligus sudah mencerminkan substansi program yang berkualitas. Termasuk didalamnya mencerminkan kesungguhan Gubernur dalam memperhatikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY sebagai bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan RKPD. Dimana selanjutnya RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS APBD (Pasal 265 UU Nomor 23 Tahun 2014).

Tema pembangunan yang diusung dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 relatif hampir sama dengan Tema Pembangunan pada Tahun 2021. Tema **“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”**, menambahkan dimensi pengembangan sektor strategis sebagai sasaran utama pembangunan. Fraksi PAN berharap pengambilan tema ini bukan pengulangan tema pembangunan tahun sebelumnya, namun harus secara tegas mencerminkan kesungguhan Pemerintah DIY gumregah dan bangkit dalam upaya perbaikan kehidupan selanjutnya seiring dengan penanganan wabah pandemi Covid-19. Seberat apapun capaian pembangunan pada tahun 2021 ini, kita harus optimis bahwa tahun 2022 langkah dan dinamika pembangunan di DIY harus lebih baik dari sebelumnya. Dengan semangat demikian itu, maka kita pantas untuk memotivasi diri bahwa tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Apalagi jika dikaitkan dengan tahun 2022 adalah tahun terakhir pelaksanaan Perda RPJMD 2017-2022, maka momentum ini harus dimanfaatkan untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan di DIY selama lima tahun terakhir.

Mendengarkan dan mencermati Penghantaran Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD DIY Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Fraksi PAN menyambut baik penghantaran yang sesuai dengan ketentuan waktu. Namun mempedomani pada tatkala waktu pembahasan, barulah sebatas satu sisi dari keseluruhan. Substansi isi program dan kegiatan dalam Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2022, tentu menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati. Guna mendalami dari paparan Gubernur pada saat Penghantaran Raperda APBD DIY Tahun Anggaran 2022 beberapa saat yang lalu, Fraksi PAN perlu untuk memohon penjelasan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Mencermati penjelasan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, analisa data dan proyeksi-proyeksi yang disampaikan menunjukkan optimisme ekonomi DIY akan bangkit dan tumbuh positif pada tahun 2022. Hal ini dengan mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2020 menunjukkan bahwa enam sektor dalam perekonomian tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan sebesar 19,18 %. Data pada kinerja ekonomi tahun 2021 semakin menunjukkan optimisme kita menyongsong pemulihan ekonomi tahun 2022. Ditopang oleh perkembangan sector informasi dan komunikasi, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor penyediaan

akomodasi dan makan minum, serta peningkatan investasi, maka pertumbuhan ekonomi yang dipatok positif tahun 2021 ini, dapat dijadikan sebagai titik tolak pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 5,4-6,0%. Jika Skenario Pesimis berani mematok angka pertumbuhan 4,08% pada tahun 2021, maka Fraksi PAN mendorong kepada Pemerintah DIY untuk bekerja lebih keras lagi sehingga pemulihan sosil ekonomi masyarakat DIY bukanlah mimpi tidak bisa terwujud.

2. Pandangan kami pada poin 1 diatas, kami ingin untuk terus mengingatkan kepada Gubernur dan seluruh jajaran Eksekutif, fokus dari kinerja pembangunan melalui APBD DIY Tahun Anggaran 2022 adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu angka kemiskinan yang meningkat pada tahun 2020 menjadi 12,8%, dan skenario pesimis Eksekutif di tahun 2021 dimungkinkan kemiskinan menjadi 12,86%, harus mampu diturunkan pada tahun 2022. Mengingat target penurunan angka kemiskinan dalam Perda RPJMD 2017-2022 mematok angka jauh dibawah prosentase tersebut. Demikian pula dengan ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) dan ketimpangan regional atau kesenjangan antar wilayah (Indeks Williamson), harus mampu semakin ditekan pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi harus didorong merata diseluruh Kabupaten/Kota jangan hanya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saja yang mengalami pertumbuhan cepat.
3. Berkaitan dengan Rencana Pendapatan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.817.091.560.258,00, Fraksi PAN mengapresiasi keberanian Eksekutif untuk mematok angka lebih tinggi dari Rencana Pendapatan APBD Perubahan Tahun 2021 baik dari sumber PAD sebesar Rp2.022.159.849.868,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.787.355.210.390,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.576.500.000,00. Terlebih dengan peningkatan sumber pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.022.159.849.868,00 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1.808.218.924.548,00, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp32.932.438.475,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp104.889.783.509,00, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp76.118.703.336,00. Apresiasi kami bukan hanya pada dimensi atau persoalan angka-angka, namun kami berharap lebih dari itu, pendapatan dari pajak dan retribusi daerah menunjukkan roda ekonomi yang semakin baik pada tahun mendatang.
4. Khusus terkait dengan Rencana Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2022 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp572.960.932.447,00 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp562.960.932.447,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp10.000.000.000,00. Fraksi PAN mempertanyakan kepada Eksekutif besaran SiLPA yang mencapai lebih dari setengah trilyun rupiah. Pada setiap pembahasan APBD Badan Anggaran DPRD DIY selalui mengingatkan pentingnya untuk mengoptimalkan

serapan anggaran guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Fraksi PAN mohon penjelasan kepada Eksekutif.

5. Prioritas Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 yang diorientasikan untuk menopang sasaran utama yaitu : 1. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi); 2. Peningkatan Infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi; 3. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial; 4. Mewujudkan Pembangunan yang merata, selaras dan lestari; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Fraksi PAN mengapresiasi lima sasaran tersebut. Namun kami juga perlu mengingatkan kepada Eksekutif untuk serius dan konsisten dalam penjabaran Program dan Kegiatan dalam RKA masing-masing SKPD fokus pada lima hal dimaksud.
6. Fraksi PAN mencermati bahwa Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan yang tersebar di seluruh SKPD, banyak mengalami penundaan dan perubahan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2021. Sementara pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, kembali dianggarkan secara signifikan khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk indikator kinerja persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dianggarkan Rp16.616.375.000, sementara untuk indikator kinerja persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan dianggarkan Rp50.000.000.000. Kami mengharapkan alokasi anggaran sebesar itu mampu mendorong kebangkitan ekonomi usaha kecil dan menengah di DIY. Mohon penjelasan Eksekutif.
7. Pada tahun 2022 belanja modal direncanakan sebesar Rp640.689.520.730,00, dengan lima sasaran peruntukan yaitu : 1. belanja modal tanah, 2. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar, 3. belanja modal gedung dan bangunan, 4. belanja modal jalan jaringan dan irigasi, 5. belanja modal aset tetap lainnya. Fraksi PAN perlu memohon penjelasan kepada eksekutif, kalkulasi dan rencana kemanfaatan dari Belanja Modal yang dilakukan terutama dalam menopang pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
8. Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan untuk indikator kinerja populasi ternak sebesar Rp19.733.278.000. Fraksi PAN mengharapkan peningkatan populasi ternak harus diorientasikan untuk peningkatan ketercukupan kebutuhan daging di DIY dan meningkatkan konsumsi protein hewani masyarakat DIY. Pada sisi lain, peningkatan konsumsi protein hewani diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan ketercukupan gizi masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan untuk pengembangan SDM unggul baik dari sisi kualitas pendidikan maupun derajat kesehatan dapat terwujud.
9. Belanja Tidak Terduga dalam Rancangan APBD DIY Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.415.200.000,00. Mengingat seluruh operasi penanganan Covid-19 sudah terencana dengan baik, demikian pula dengan alokasi anggaran pada APBD DIY untuk penanggulangan bencana lainnya, Fraksi PAN meminta penjelasan Gubernur dan Eksekutif rencana penggunaan dana tersebut. Fraksi PAN tidak mengharapkan alokasi pada Belanja Tidak Terduga seperti menjadikan "dana idol" yang penggunaannya seolah-olah menjadi sangat fleksibel tanpa perencanaan. Mohon penjelasan kepada Eksekutif.

Hadirin Sidang Paripurna DPRD Yang Kami Hormati,

Demikianlah pandangan umum dari FPAN atas RAPBD Tahun 2022. Akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dalam penyampaian pandangan umum ini. Kami akhiri Billa hitau fiq wal Hidayah.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

**YOGYAKARTA, 6 SEPTEMBER 2021
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Ir. Atmaji
Ketua



drg. Hj. Hanum Salsabiela. MBA
Sekretaris